

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berbasis otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperkuat peran daerah sebagai pelaksana pembangunan dengan memberikan keleluasaan dalam merancang program sesuai prioritas masing-masing wilayah.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, diperlukan pembiayaan yang memadai. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya. Penyerahan urusan dan pendanaan tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat dan menetapkan arah pembangunan yang efektif dan berdaya guna.

Dalam konteks ini, APBD menjadi instrumen utama yang mencerminkan kebijakan fiskal daerah, mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah sendiri merupakan seluruh hak keuangan daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Melalui otonomi daerah, diharapkan terjadi peningkatan

kualitas pelayanan publik, baik layanan langsung kepada masyarakat maupun melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, guna mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyusun alokasi dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Putri et al., 2021). Salah satu bentuk alokasi dana dalam APBD adalah anggaran untuk Belanja Modal, yang ditujukan untuk menambah aset tetap. Priambudi (2017) menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana, serta mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum.

Belanja modal sendiri merupakan salah satu jenis pengeluaran dalam belanja daerah yang digunakan untuk membeli atau menyediakan barang berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dan digunakan dalam pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik (Halim, 2014). Penggunaan belanja ini tidak hanya berdampak langsung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks keuangan daerah, belanja modal mencerminkan orientasi pembangunan berkelanjutan karena hasil dari pengeluaran tersebut akan memberikan manfaat lintas tahun anggaran. Oleh karena itu, efektivitas perencanaan dan realisasi belanja modal menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya

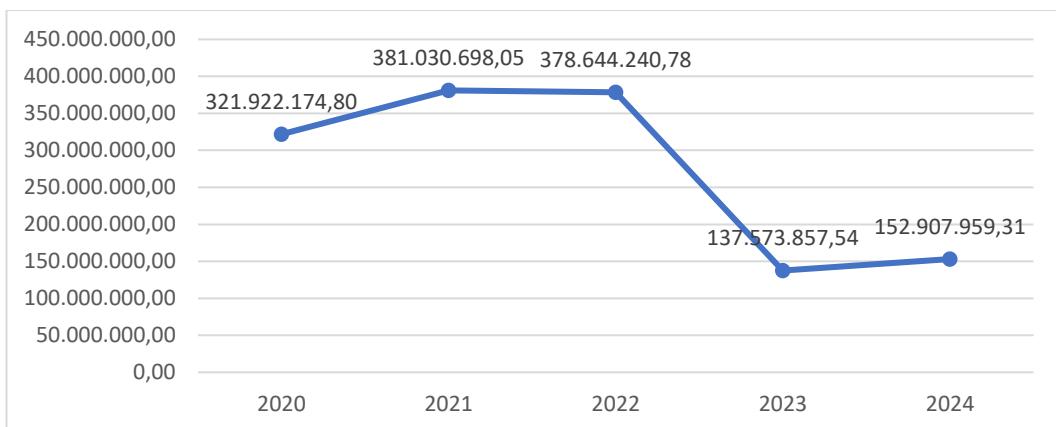
fiskalnya secara optimal. Keterkaitan antara belanja modal dengan aspek fiskal, struktural, serta tekanan demografis menunjukkan bahwa alokasi belanja ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, alokasi belanja modal di Kota Tasikmalaya kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek fiskal, institusional, maupun struktural. Selama kurun waktu 2011 hingga 2024, belanja modal menunjukkan dinamika yang mencerminkan permasalahan mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Fluktuasi alokasi anggaran belanja modal dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator ketidakkonsistenan dalam pengelolaan fiskal daerah. Ketidakstabilan ini berdampak pada proyek pembangunan, serta menurunkan efisiensi anggaran juga, mengingat keperluan infrastruktur publik memerlukan kesinambungan pendanaan untuk menghasilkan output yang optimal.

Selain itu, rendahnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah menjadi masalah tersendiri. Belanja modal yang idealnya difungsikan sebagai alat pembangunan jangka panjang justru cenderung tersisih oleh dominasi belanja operasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan prioritas anggaran, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Efektivitas belanja modal juga dalam pelaksanaan teknisnya selalu mengalami kendala seperti pelaksanaan proyek yang melampaui waktu yang direncanakan menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan pembangunan. Situasi ini diperburuk oleh adanya

penyesuaian anggaran secara masif pada masa pandemi Covid-19 khususnya tahun 2020 dan 2021, yang menyebabkan sejumlah besar kegiatan belanja modal ditunda, dibatalkan, atau dialihkan demi penanganan krisis kesehatan dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap keterlambatan pemenuhan infrastruktur dasar dan menimbulkan tertundanya pemenuhan layanan publik di berbagai sektor.

Permasalahan dalam efektivitas dan proporsi belanja modal tersebut tercermin dalam tren alokasi belanja modal Kota Tasikmalaya selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data berikut ini menggambarkan fluktuasi yang cukup signifikan, yang menjadi indikator adanya ketidakstabilan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja modal.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah penulis (2025)

**Gambar 1. 1 Belanja Modal di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024
(Ribu Rupiah)**

Belanja modal Kota Tasikmalaya selama 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat fluktuatif, dengan lonjakan dan penurunan yang tajam. Setelah sempat meningkat dari Rp321,9 miliar pada 2020 menjadi Rp381 miliar pada 2021 dan relatif stabil di 2022, belanja modal mengalami penurunan curam pada

2023 menjadi Rp137,5 miliar sebelum sedikit meningkat kembali pada 2024.

Pola ini mencerminkan ketidakstabilan dalam kebijakan fiskal dan prioritas belanja daerah. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan adanya perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan arah perubahan alokasi belanja pemerintah daerah yang bisa dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. 1 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Dengan Belanja Lainnya Tahun 2022 dan 2023 (Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2022	2023	Selisih	Perubahan (%)
Belanja Modal	378.644.240,78	137.573.857,54	-241.070.383,24	↓ 63,6%
Belanja Bantuan Sosial	697.300,00	2.800.000,00	2.102.700,00	↑ 301,6%
Belanja Subsidi	142.670,00	512.325,00	369.655,00	↑ 259,1%
Belanja Tidak Terduga	2.866.164,89	4.216.299,53	1.350.134,64	↑ 47,1%
Belanja Barang & Jasa	648.183.496,78	697.497.828,09	49.314.331,31	↑ 7,6%

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah penulis (2025)

Berdasarkan tabel diatas, penurunan pada belanja modal 2023 menunjukkan dinamika alokasi anggaran yang mencerminkan pergeseran prioritas fiskal daerah. Belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan dan turun sebesar 63,6%. Penurunan ini tidak terjadi dalam kekosongan, melainkan beriringan dengan meningkatnya alokasi pada beberapa jenis belanja lainnya. Salah satu yang paling mencolok adalah belanja bantuan sosial, yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dari Rp697 juta menjadi Rp2,8 miliar (naik 301,6%), serta belanja subsidi yang naik sebesar 259%. Ditambah dengan belanja tidak terduga juga yang mengalami peningkatan 47,1%, dan belanja barang dan jasa naik sebesar 7,6%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023,

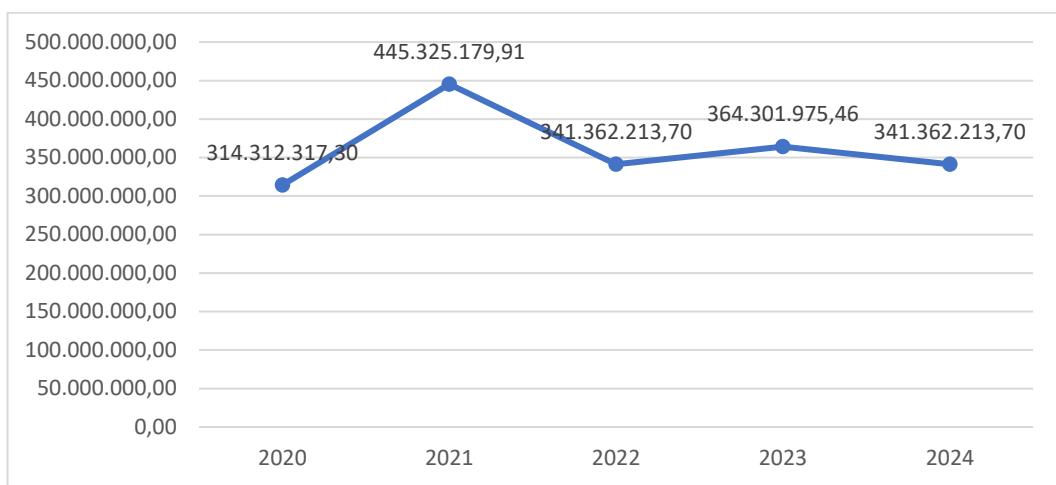
Pemerintah lebih memfokuskan pengeluaran pada aspek-aspek sosial dan operasional yang bersifat jangka pendek dan langsung menyentuh masyarakat, dibandingkan dengan investasi jangka panjang melalui belanja modal. Dengan demikian, penurunan belanja modal dapat dipahami sebagai bentuk realokasi fiskal yang diarahkan untuk merespons kebutuhan sosial dan operasional yang lebih mendesak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi tajam belanja modal mencerminkan eratnya keterkaitan antara perencanaan anggaran dan kapasitas fiskal daerah. Ketergantungan pada kebijakan fiskal dan transfer pusat menjadikan alokasi belanja modal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana setiap tahunnya, yang pada akhirnya menentukan ruang fiskal untuk investasi publik jangka panjang.

Belanja modal secara langsung dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, di mana PAD, DAU, dan DBH menjadi sumber utama pembiayaannya. Namun, rendahnya kontribusi PAD di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, khususnya DAU dan DAK. Ketergantungan ini membatasi fleksibilitas fiskal dalam menentukan prioritas belanja modal yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta menghambat kemampuan daerah dalam membiayai investasi publik secara mandiri dan berkelanjutan.

Untuk melihat lebih jauh peran kapasitas fiskal daerah menopang belanja modal khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu ditinjau tren

realisasi PAD selama lima tahun terakhir tepatnya tahun 2020-2024 yang menunjukkan belum stabilnya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri sebagai sumber pемbiayaan pembangunan.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah penulis (2025)

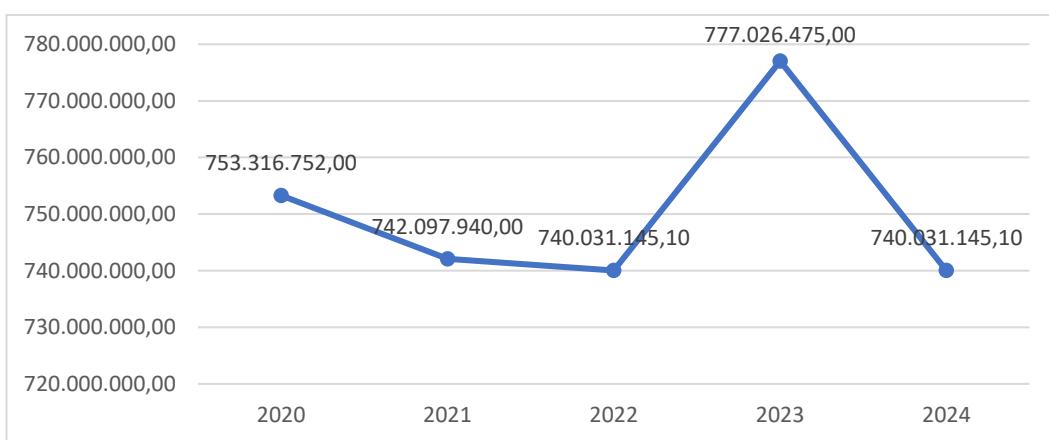
Gambar 1. 2 PAD di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

PAD Kota Tasikmalaya pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan kondisi fiskal yang belum stabil. Pada 2020, PAD sebesar Rp314,3 miliar meningkat tajam menjadi Rp445,3 miliar di 2021, meskipun masih dalam masa pandemi. Kenaikan ini mengindikasikan adanya dorongan optimalisasi pendapatan daerah. Namun, pada 2022 terjadi penurunan drastis ke Rp341,3 miliar, yang kembali terulang pada 2024 setelah sempat naik menjadi Rp364,3 miliar di 2023. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa PAD masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pertumbuhan.

Fluktuasi PAD tersebut berpengaruh langsung terhadap belanja modal Kota Tasikmalaya, mengingat PAD merupakan salah satu sumber utama pемbiayaan pembangunan daerah. Penurunan tajam PAD pada tahun 2022 dan 2024 sejalan dengan rendahnya alokasi belanja modal pada periode yang sama, yang

menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk investasi publik. Ketika PAD meningkat, seperti pada 2021 dan 2023, terdapat kecenderungan peningkatan atau stabilisasi alokasi belanja modal, meskipun tidak selalu proporsional. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada PAD yang belum sepenuhnya stabil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas perencanaan dan realisasi belanja modal di Kota Tasikmalaya.

Selain PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) juga memegang peranan penting dalam pemberian belanja modal daerah, terutama di tengah keterbatasan PAD yang belum stabil. Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kapasitas fiskal Kota Tasikmalaya, penting pula meninjau perkembangan DAU selama periode 2020–2024. Grafik berikut menyajikan tren DAU yang turut mencerminkan arah kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat serta kontribusinya dalam menjaga kesinambungan belanja pembangunan di daerah.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah penulis (2025)

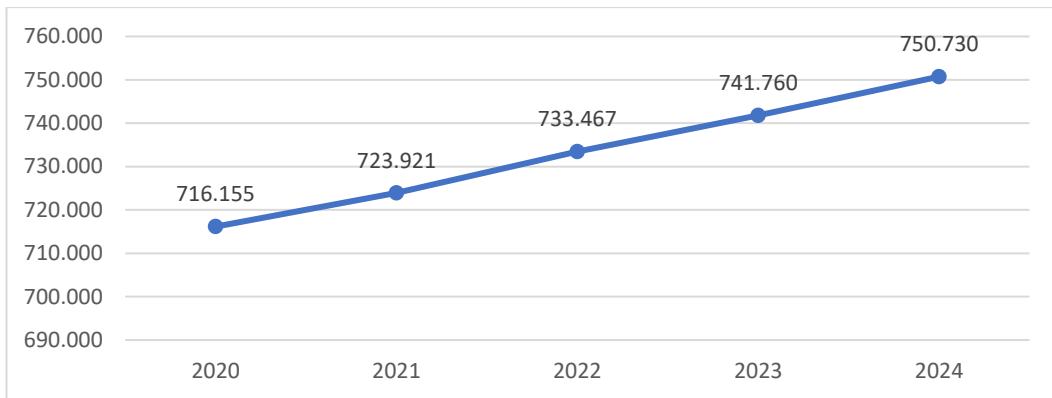
Gambar 1. 3 DAU di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Perkembangan DAU Kota Tasikmalaya periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional. Setelah mengalami penurunan berturut-turut dari Rp753,3 miliar pada 2020 menjadi Rp740,0 miliar pada 2022, alokasi DAU melonjak tajam pada 2023 mencapai Rp777,0 miliar. Namun, kenaikan ini tidak berlanjut karena pada 2024 kembali turun ke Rp740,0 miliar. Pola ini mencerminkan ketidakstabilan transfer pusat yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.

Fluktuasi DAU tersebut memiliki implikasi langsung terhadap belanja modal, mengingat DAU merupakan salah satu sumber utama pendanaan belanja pembangunan, terutama bagi daerah dengan PAD yang terbatas. Kenaikan signifikan DAU pada tahun 2023 sejalan dengan adanya sedikit peningkatan belanja modal, meskipun tidak sepenuhnya proporsional. Sebaliknya, penurunan DAU pada 2021, 2022, dan kembali pada 2024 beriringan dengan rendahnya alokasi belanja modal di tahun-tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Tasikmalaya terhadap transfer pusat masih tinggi, dan ketidakstabilan DAU berpotensi mengganggu kesinambungan investasi publik, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Selain dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, alokasi belanja modal juga perlu mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui karakteristik demografis berupa dinamika jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menciptakan tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau perkembangan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya

selama periode 2020–2024 guna memahami sejauh mana belanja modal diarahkan untuk merespons perubahan kebutuhan demografis.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah penulis (2025)

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024 (Jiwa)

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan stabil selama 2020–2024, dari 716.155 jiwa pada 2020 menjadi 750.730 jiwa di 2024. Kenaikan tiap tahun menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten tanpa penurunan, dengan lonjakan tertinggi terjadi antara 2022 dan 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika demografis yang berdampak langsung pada kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar, serta menjadi pertimbangan penting dalam alokasi belanja modal daerah.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang konsisten tersebut berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan akan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti transportasi, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam konteks ini, belanja modal seharusnya diarahkan untuk menjawab tuntutan pembangunan yang muncul akibat tekanan demografis. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan belanja modal yang memadai, maka risiko kesenjangan pelayanan publik akan semakin besar. Oleh karena itu, tren

kenaikan jumlah penduduk harus menjadi salah satu acuan strategis dalam perencanaan dan pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dua pilar utama dalam struktur penerimaan daerah yang secara langsung menentukan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja modal. Kenaikan PAD tidak hanya mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal, tetapi juga memperkuat otonomi daerah dalam merancang dan merealisasikan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor-sektor produktif yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Sementara itu, DAU yang bersifat *block grant* dan berasal dari pemerintah pusat berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antarwilayah, terutama bagi daerah dengan kapasitas PAD yang masih terbatas. Oleh karena itu, fluktuasi pada PAD dan DAU menjadi indikator krusial dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran untuk investasi publik jangka menengah dan panjang, termasuk pengadaan infrastruktur dasar, fasilitas layanan publik, serta penguatan daya saing wilayah.

Di sisi lain, dinamika jumlah penduduk juga memberikan pengaruh signifikan terhadap tekanan dan kebutuhan belanja modal. Pertumbuhan penduduk yang konsisten dari tahun ke tahun menandakan meningkatnya permintaan terhadap pelayanan dasar seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Kebutuhan ini menuntut perencanaan anggaran yang adaptif dan responsif terhadap perubahan demografis. Namun, apabila peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi

oleh pertumbuhan penerimaan daerah yang memadai, maka akan terjadi ketimpangan antara kapasitas fiskal dan beban pelayanan publik, yang pada akhirnya berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk investasi pembangunan. Oleh karena itu, interaksi antara PAD, DAU, dan jumlah penduduk perlu dianalisis secara holistik dan integratif agar perumusan kebijakan anggaran belanja modal dapat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah disajikan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung mendorong peningkatan alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan temuan dari Suryani and Pariani (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi PAD dan DAU yang diterima suatu daerah, maka semakin besar pula alokasi untuk belanja modal. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vanesha, Rahmadi, dan Parmadi (2019) yang menyimpulkan bahwa PAD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Padahal, belanja modal yang ditujukan untuk kepentingan publik seharusnya diperbesar agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan berbagai program masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis juga menambahkan variabel jumlah penduduk untuk menganalisis pengaruhnya terhadap belanja modal. Dengan demikian, dapat diketahui apakah peningkatan jumlah penduduk turut mendorong investasi dalam belanja modal, yang juga dipengaruhi oleh PAD dan DAU.

Berdasarkan data, hasil penelitian terdahulu dan uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal di Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis membuat rumusan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk secara parsial terhadap belanja modal di Kota Tasikmalaya tahun 2011-2024?
- b. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap belanja modal di Kota Tasikmalaya tahun 2011-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk secara parsial terhadap belanja modal di Kota Tasikmalaya tahun 2011-2024.

- b. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap belanja modal di Kota Tasikmalaya tahun 2011-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan baru khususnya terkait belanja modal di daerah Kota Tasikmalaya karena variabel ini masih jarang dibahas atau diteliti orang lain dan bisa menjadi salah satu bahan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau perbandingan untuk penelitian sejenis yang membahas atau terkait dengan belanja modal. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai belanja modal di Kota Tasikmalaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal di Kota Tasikmalaya.

b. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi tambahan data serta masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai belanja modal di Kota Tasikmalaya.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik sebagai bahan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan maupun sebagai persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) serta dapat memperoleh gambaran keilmuan yang bermanfaat bagi peneliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada data sekunder yaitu berupa publikasi laporan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, jumlah penduduk, dan belanja modal dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan sejak keluarnya surat keputusan pada bulan Agustus 2024. Jadwal Penelitian digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2024	2025					
		Agu	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	SK Bimbingan	■						
2.	Pengajuan Judul		■	■				
3.	Penyusunan Usulan Penelitian			■	■			
4.	Seminar Proposal Penelitian					■		
5.	Pelaksanaan penelitian :						■	
	a. Pengumpulan Data						■	
	b. Pengolahan Data							
	c. Analisis Data							
6.	Pelaporan :						■	■
	a. Penyusunan Laporan							
	b. Laporan Hasil Skripsi							
7.	Sidang Skripsi							■